

# RENCANA STRATEGIS

RENSTRA  
TAHUN 2021 – 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Rencana Strategis tahun 2021 – 2026.

Renstra ini merupakan acuan atau pedoman dalam pencapaian kinerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi periode tahun 2021 – 2026.

Mudah-mudahan Renstra ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 2021

Kepala  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi



**USMAN JAELANI, SH., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641207 199503 1 001



## **Daftar Isi**

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-26
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	III-12
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-37
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .....	III-39



<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu untuk menyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi ini menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2021 – 2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi, 2021 – 2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa bhakti 2021 – 2026. maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Peran dan kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang diberi tugas dalam Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi menentukan arah pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi.



## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20).
15. **Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.**
16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
17. Peraturan Bupati Sukabumi nomor 103 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam Renstra 2021 -2026 yaitu :





Visi Kabupaten Sukabumi

***"Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius,  
Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir  
Batin"***

Misi Kabupaten Sukabumi

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

#### **1.3.1. Maksud**

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi yang memuat kebijakan keuangan, kebijakan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

Menyediakan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dalam menyusun Rencana kerja sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur selama 1 (satu) tahun, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.



Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas pelaksanaan program secara terukur.

### **1.3.2. Tujuan**

- a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur selama 1 (satu) tahun;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi **Nomor 4 Tahun 2016**;
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 disusun dengan Sitematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 103 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, dengan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

##### **a. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi mempunyai kedudukan dan Tugas Pokok sebagai berikut :

- 1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, bidang penempatan tenaga kerja, bidang bina pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan syarat kerja, bidang transmigrasi; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. Penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- f. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi terdiri dari :



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Antar Kerja Dalam dan Luar Negeri;
  - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
  - 1. Seksi Bina Pelatihan Kerja dan Pemagangan;
  - 2. Seksi Bina Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan:
  - 1. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - 2. Seksi Syarat Kerja.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
  - 1. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi;
  - 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



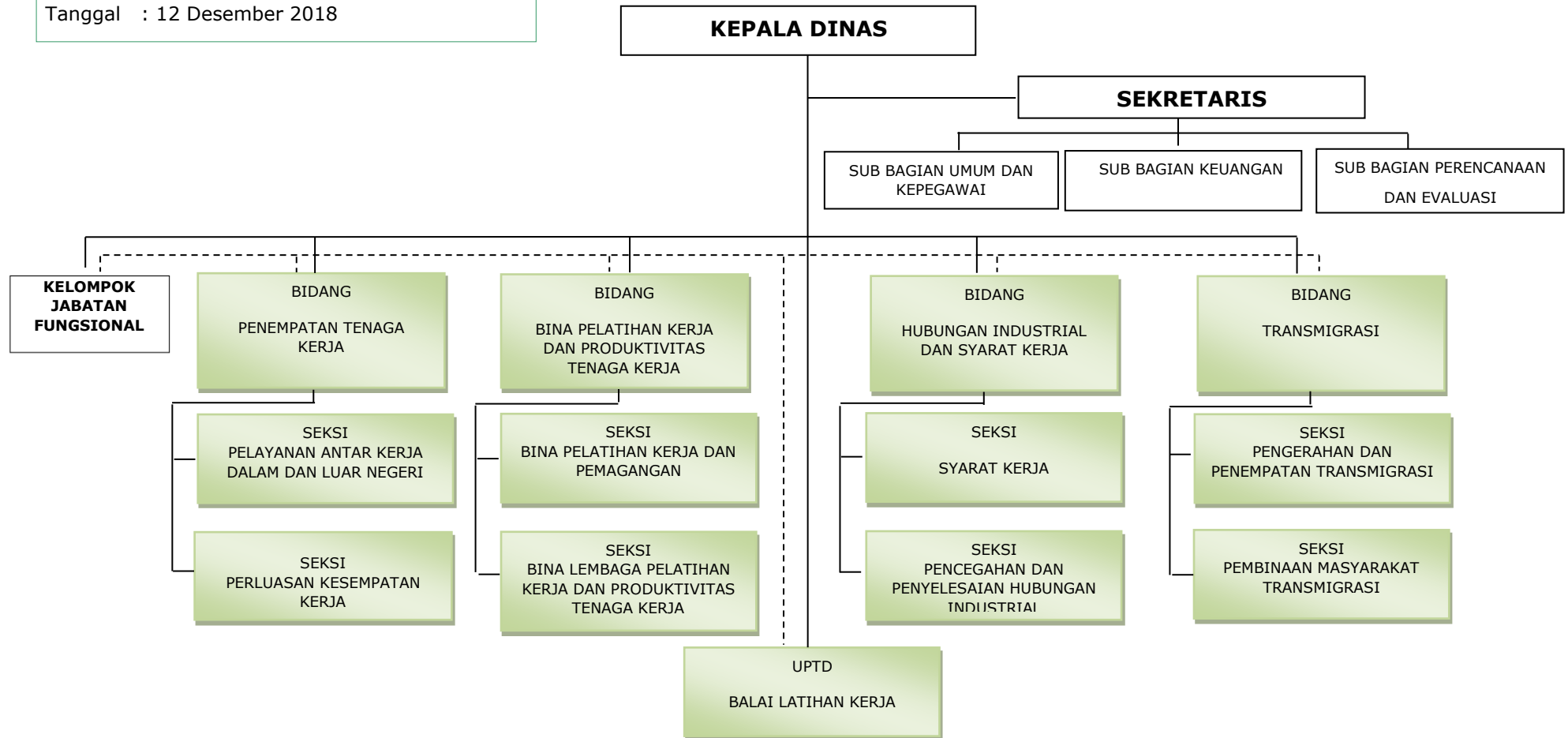
1. Penggerak Swadaya Masyarakat ( PSM );
2. Pengantar Kerja;
3. Instruktur;
4. Arsiparis;
5. Mediator.





## Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi  
Nomor : 103 Tahun 2018  
Tanggal : 12 Desember 2018





## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **a) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia / pegawai yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun disadari, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan masih kurang terutama untuk jabatan fungsional mediator ketenagakerjaan dan fungsional pengantar kerja.

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas akan disajikan ke dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Per Januari 2021**

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	6	6	12
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	10	1	11
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	7	-	7
5.	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4	3	7
6.	Bidang Transmigrasi	5	1	6
7.	UPT BLK	22	5	27
<b>Jumlah Total</b>		<b>55</b>	<b>16</b>	<b>71</b>



Tabel 2.3

Rekapitulasi Pegawai  
Berdasarkan Golongan Per Januari 2021

No	Unit Kerja	Jumlah ASN	Golongan															
			I				II				III				IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	12	-	-	-	-	-	-	4	-	1	2	1	2	1	1	-	-
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	11	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	2	1	-	-	-
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
5.	Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-
6.	Bidang Transmigrasi	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-	-
7.	UPTD BLK	27	-	-	-	-	-	-	10	4	1	2	1	5	-	4	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>71</b>	-	-	-	-	-	-	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-



Tabel 2.4

**Rekapitulasi Pegawai  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Januari 2021**

No	Unit Kerja	Golongan									Keterangan
		SD	SMP	SLTA	D.I	D.II	D.III	S.1	S.2	S.3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2.	Sekretariat	-	-	4	-	-	-	4	4	-	
3.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	-	-	6	-	-	-	4	1	-	
4.	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	-	-	2	-	-	-	3	2	-	
5.	Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	1	-	-	-	4	2	-	
6.	Bidang Transmigrasi	-	-	2	-	-	-	3	1	-	
7.	UPTD BLK	-	-	-	-	-	16	9	2	-	
<b>Jumlah Total</b>		-	-	<b>15</b>	-	-	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	-	



**b) Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Meskipun demikian, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi akan disajikan ke dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.5

Daftar Aset Tetap  
Gedung dan Bangunan Per Desember 2020

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>		
	<b>Bangunan Gedung</b>		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Sukabumi	70,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km.6 No. 703 Sukabumi	137,20
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan Km.6 No. 703 Sukabumi	66,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. PELABUHAN II KM. 6 NO. 703 SUKABUMI	322,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Sukabumi	590,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pelabuhan II Km.6 No.703 Sukabumi	402,00
	- Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Jl. Plabuhan II Kota SMI Kab. Sukabumi	57,53
	- Bangunan Bengkel Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	36,00
	- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Semi Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	312,00
	- Gedung Garasi/Pool Permanen	Jl. Raya Kadupugur Km. 10,4 Cicantayan Sukabumi	80,00
	- Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Sukabumu	176,32
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	260,00



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

---

	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Badan Diklat Jl. Raya Kadupugur Km 10,4 Cicantayan Sukabumi	670,00
	- Bangunan Taman	Jl. Plabuhan II Kota SMI Kab. Sukabumi	80,50
	<b>Pertamanan</b>		
	- Bloomenbak	Jl. Plabuhan II Kota SMI Kab. Sukabumi	278,00





**Tabel 2.5**  
**Daftar Aset Tetap**  
**Peralatan dan Mesin Per Desember 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	2.825
	<b>Alat-alat Besar</b>	1
	- Pompa Lain-lain	1
	<b>Alat-alat Angkutan</b>	36
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6
	- Mobil Unit Panggung	1
	- Sepeda Motor	29
	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	1.529
	- Mesin Bubut	1
	- Mesin Press	3
	- Mesin Ketam	4
	- Mesin Pres Hidrolik & Punsh	2
	- Mesin Bor	23
	- Mesin Kompresor	1
	- Mesin Las Listrik	1



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

-	Mesin Dynamo Kron	3
-	Mesin Penekuk Plat	1
-	Mesin Pembengkok Plat	3
-	Mesin Pemotong Plat	2
-	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6
-	Mesin Gerinda Tangan	1
-	Mesin Ampelas Tangan	9
-	Mesin Ampelas Rol Kecil	2
-	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6
-	Solder Listrik	17
-	Perkakas Bengkel Lain-lain	193
-	Mesin Spooling	1
-	Pengasah Lobang Stang Piston	1
-	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	32
-	Auto Hoist	4
-	Perkakas Pengangkat Bermesin Lain-lain	2
-	Mesin Gergaji	4
-	Mesin Ketam	8
-	Mesin Penghalus	1
-	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	9
-	Mesin Tenun Textil	3
-	Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain	4
-	Peralatan Las Listrik	9
-	Peralatan Las Karbit	2
-	Peralatan Las Lain-lain	31



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

-	Perkakas Bangku Kerja	1
-	Pisau Bergigi	4
-	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	41
-	Armature Drying Oven	6
-	Perkakas Pengangkat Lain-lain	18
-	Tool Kit Set	31
-	Tool Kit Boks	56
-	Fuller Set	2
-	Perkakas Standar Lain-lain	67
-	Kunci Khusus Untuk Engine	7
-	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud	27
-	Kunci Khusus Momen	2
-	Perkakas Khusus Lain-lain	11
-	Gergaji	49
-	Ketam	65
-	Bor	18
-	Pahat	68
-	Water Pas	14
-	Siku	10
-	Palu	59
-	Tang	70
-	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	117
-	Guting Plat	6
-	Gunting Plat Tangan	8
-	Tang Kombinasi	25



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

-	Kikir, Segi Empat, Segi Tiga, Setengah Bulat, Bula	40
-	Kunci Pas Satu Set	34
-	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	33
-	Boor Engkol	17
-	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	53
-	Meteran Kain	2
-	Trap Latihan	5
-	Volt Meter High Tenson	4
-	Signal Generator Audio VHF, UHF	7
-	Megger	2
-	CO Axial Attenuator	1
-	Frequency Counter	1
-	Alat Ukur Kepribadian Lain-lain	1
-	Alat Ukur/Test klinis Lain-lain	2
-	Alat Calibrasi Lain-lain	3
-	Videoscope With Side Band Adaptor	2
-	RF Bridge	1
-	Universal Tester Lain-lain	4
-	Loup	16
-	Micro Meter	27
-	Air Conditioning Unit	4
-	Compresor Unit	1
-	Avometer SU 20-20 K	47
-	Tool Set	3
-	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	10



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

-	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	32
-	Timbangan	4
-	Takaran Bahan Bangunan 2 HL Berbentuk Tong	1
-	Takaran Latex Lain-lain	1
<b>Alat Pertanian</b>		<b>57</b>
-	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	15
-	Pompa Air	2
-	Mesin Penetas Telur	4
-	Oven	2
-	Alat Processing Lain-lain	4
-	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	8
-	Kored	4
-	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3
-	Alat Perontok Mesin (Power Theresar)	1
-	Honey (Penggulung Beras)	4
-	Rak-rak Penyimpanan	2
-	Lemari Penyimpanan	7
-	Alat Laboratorium Lain-lain	1
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>		<b>1.093</b>
-	Lemari Besi	10
-	Rak Besi/Metal	10
-	Rak Kayu	3
-	Filling Besi/Metal	46



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

-	Band Kas	4
-	Kardek Besi/Metal	1
-	Lemari Kaca	4
-	Lemari kayu	2
-	Papan Visuil	3
-	Perkakas Kantor	14
-	Alat Penghancur Kertas	2
-	Papan Nama Instansi	2
-	Papan Tulis	1
-	White Board	26
-	Alat Penghancur Kertas Globe	2
-	Mesin Absensi	1
-	Overhead Projektor	1
-	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9
-	Generator Set (Genset)	1
-	Lemari Kayu	11
-	Rak Kayu	5
-	Meja Besi/Metal	2
-	Meja Kayu/Rotan	23
-	Kursi Besi/Metal	26
-	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2
-	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	10
-	Meja Rapat	4
-	Meja Podium	1
-	Kursi Tamu	4



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

---

-	Kursi Lipat	118
-	Meja Komputer	32
-	Tenda	1
-	Meja Biro	11
-	Sofa	4
-	MOUBILER LAINNYA	15
-	Mesin Penghisap Debu	2
-	Mesin Potong Rumput	3
-	Alat Pembersih Lain-lain	4
-	Lemari Es	1
-	AC Unit	3
-	AC Split	52
-	Kipas Angin	13
-	Alat Pendingin Lain-lain	1
-	Treng Air	2
-	Alat Dapur Lain-lain	18
-	Televisi	7
-	Amplifiler	2
-	Loudspeaker	2
-	Compact Disc	3
-	Wireless	5
-	Microphone	1
-	Unit Power Supply	5
-	Stabilisator	3
-	Mesin Jahit	19



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

---

-	Aquarium	2
-	Seterika	2
-	Water Filter	1
-	Handy Cam	1
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	200
-	Gorden	2
-	Alat Pemadam Portable	3
-	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	5
-	Mainframe	1
-	Internet	1
-	P.C Unit	38
-	Laptop	22
-	Note Book	12
-	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
-	CPU	5
-	Printer	27
-	Monitor	1
-	Printer	12
-	Scanner	3
-	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	6
-	UPS / Stabilizer	6
-	Fingerprint Scanner	5
-	Router	1
-	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1





**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16
-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	63
-	Meja Tamu Ruangan Biasa	2
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13
-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	58
-	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	14
-	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1
	<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>	<b>86</b>
-	Proyektor + Attachment	2
-	Audio Attenuator	1
-	Microphone/Wireless Mic	1
-	Microphone Floor Stand	1
-	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1
-	Digital Audio Storage System	1
-	Peralatan studio Visual Lain-lain	3
-	Peralatan studio Video dan film A Lain-lain	4
-	Mesin Cetak Listrik Elektronik	1
-	Mesin Cetak Offset Roll	1
-	Mesin Press	2
-	Mesin Jahit Benang	24



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

-	Peralatan Cetak Lain-lain	10
-	Peralatan Computing Lain-lain	4
-	Rectifier	4
-	Kompas	16
-	Sound System	1
-	Pesawat Telephone	2
-	Facsimile	1
-	Alat Komunikasi Lain-lain	1
-	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	1
-	Infocus	3
-	Switchwe Antena Lain-lain	1
	<b>Alat-alat Kedokteran</b>	<b>7</b>
-	Tablet Machine	2
-	Video Camera dan Recorder	1
-	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan	3
-	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	1
	<b>Alat Laboratorium</b>	<b>15</b>
-	TV Monitor	5
-	Presciion Filing Machine	6
-	Personal Komputer	1
-	Layar	1



	- Tachometer	2
	<b>Alat-alat Perenjataan/Keamanan</b>	1
	- Alat Keamanan Lain-lain	1



### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang telah dilaksanakan, disajikan ke dalam tabel di bawah ini :



**Tabel T-C.23.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2021					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
<b>RENSTRA LAMA</b>																						
1	Rasio penduduk yang bekerja				93,64	93,75	93,84				93,55	94,88	92,23				99,90	101,21	98,3			
2	Pencari Kerja yang ditempatkan				54,67	55,77	56,88				53,60	57,86	78,18				98,04	103,75	137			
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				54,67	55,77	56,88				58,50	56,88	62,72				107,01	101,99	110			
4	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)				140,00	140,00	140,00				140,00	140,00	140,00				100,00	100,00	100			
5	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi				100,00	100,00	100,00				100,00	240,00	140,00				100,00	240,00	140			
6	Jumlah pelatihan berbasis masyarakat				200,00	200,00	200,00				200,00	280,00	120,00				100,00	140,00	60			
7	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial				100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100			
8	Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)				20,00	40,00	40,00				200,00	280,00	120,00				1000,00	700,00	300			
9	Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pada tahun berjalan				15,00	16,20	16,80				15,00	16,60	17,00				100,00	102,47	101			
10	Jumlah KK transmigran yang dibina				30,00	30,00	30,00				30,00	30,00	30,00				100,00	100,00	100			



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2021						Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2021					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
<b>RENSTRA BARU</b>																						
1	Tingkat pengangguran terbuka							7-12	7-12	7-12				7,99	9,60					86	93	
2	Jumlah pencari kerja dan memiliki kompetensi							100,00	100,00	100,00				100,00	100,00					100,00	100,00	
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja							65,00	65,00	67,00				62,68	61,56					96,43	94,71	
4	Presentase penyelesaian kasus hubungan industrial							100,00	100,00	100,00				100,00	100,00					100,00	100,00	
5	Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan							10,00	20,00	25,00				5,00	0,00					50,00	0,00	
6	Jumlah KK transmigran yang dibina							30,00	30,00	30,00				30,00	40					100,00	133,33	



**Tabel T-C.24.**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi**

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2016 - 2021						Realisasi Anggaran pada Tahun 2016 - 2021						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016 - 2021						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	634.660.300	1.010.227.296	1.111.286.319	1.599.370.900	1.405.889.100	-	624.367.868	891.521.319	1.077.166.914	1.545.577.199	1.381.113.199	-	98,38	88,25	96,93	96,64	98,24	-	1.152.286.783	1.103.949.300
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.493.685.450	1.480.636.503	1.319.028.488	938.583.300	580.868.500	-	1.363.398.200	1.446.110.551	1.254.531.479	901.878.813	554.013.461	-	91,28	97,67	95,11	96,09	95,38	-	1.162.560.448	1.103.986.501
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.900.000	55.192.000	-	63.888.000	-	-	48.900.000	55.092.000	-	63.625.500	-	-	100,00	99,82	0,00	99,59	0,00	-	33.596.000	33.523.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.800.000	44.100.000	50.000.000	15.000.000	-	-	46.787.500	43.650.000	49.834.600	14.500.000	-	-	75,71	98,98	99,67	96,67	0,00	-	34.180.000	30.954.420
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	189.097.825	722.254.833	556.264.761	174.950.000	37.319.000	-	182.532.000	677.635.133	496.660.500	173.808.000	37.319.000	-	96,53	93,82	89,28	99,35	100,00	-	335.977.284	313.590.927
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	2.813.163.500	1.235.000.000	1.039.012.000	911.983.200	1.860.977.400	-	720.113.000	1.184.027.650	929.498.233	888.692.200	1.839.928.870	-	25,60	95,87	89,46	97,45	98,87	-	1.572.027.220	1.112.451.991
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	75.000.000	1.619.411.000	982.711.200	1.483.234.600	212.066.000	-	65.708.500	1.553.880.015	960.691.400	1.449.359.981	210.291.000	-	87,61	95,95	97,76	97,72	99,16	-	874.484.560	847.986.179
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	618.200.000	-	294.517.000	862.000.000	582.325.000	-	459.263.000	-	237.838.000	835.413.000	414.887.000	-	74,29	0,00	80,76	96,92	71,25	-	471.408.400	389.480.200
Program Transmigrasi	506.514.000	402.840.000	301.906.950	336.360.000	80.871.000	-	264.230.850	313.699.000	260.832.950	333.140.100	80.871.000	-	52,17	77,87	86,40	99,04	100,00	-	325.698.390	250.554.780



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **a) Tantangan**

Dalam pelayanannya di bidang ketenagakerjaan banyak sekali tantangan baik di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lingkungan Eksternal yang dihadapi diantaranya ;

1. Semakin meningkatnya angka pengangguran, kurangnya kompetensi para pencari kerja; tidak sesuai antara kesempatan kerja yang ada dengan kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja;
2. Sedikitnya tenaga kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
3. Masih adanya perusahaan yang tidak paham akan aturan ketenagakerjaan;
4. Masih adanya tenaga kerja yang belum masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Masih kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha;
6. Masih banyaknya Tenaga Kerja Ilegal dan tidak mempunyai kompetensi;
7. Masih banyaknya kasus perselisihan ;
8. Masih banyaknya masyarakat yang tidak paham akan program transmigrasi ;





9. Produktifitas masyarakat transmigrasi lokal yang belum optimal.

Sedangkan permasalahan yang ada di lingkungan internal diantaranya :

1. Kurangnya Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang – bidang teknis;
3. Jumlah dan kondisi peralatan untuk praktik pelatihan kerja/keterampilan masyarakat perlu ditingkatkan sesuai perkembangan;
4. Belum adanya sarana mobilitas pelayanan ketenagakerjaan;
5. Kurangnya tenaga pengantar kerja;
6. Kurangnya tenaga Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);
7. Kurangnya tenaga Mediator Hubungan Industrial.

**b) Peluang**

Peluang yang ada pada lingkungan Eksternal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi :

1. Banyaknya Kesempatan Kerja bagi pekerja;
2. Banyaknya Investor yang masuk ke Wilayah Kabupaten Sukabumi;



3. Banyaknya tenaga kerja yang tersedia.
4. Adanya system aplikasi SILENT CENTER (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center) Pusat Ketenagakerjaan Sukabumi yang Terintegrasi, yang memudahkan masyarakat atau pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja maupun melamar pekerjaan secara online.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain:

Permasalahan-permasalahan yang ada di Disnakertrans Kabupaten Sukabumi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, yaitu :

Masalah Ketenagakerjaan :

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan;
5. Tidak seimbangnya penerimaan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan, perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki;
6. Rendahnya kompetensi pencari kerja;
7. Kurangnya sarana prasarana aparatur.



Masalah Ketransmigrasian :

1. Keterbatasan kuota target pemberangkatan;
2. Terjadinya perubahan regulasi;
3. Rendahnya tingkat kompetensi masyarakat translok;
4. Tidak tersedianya petugas pendamping di setiap lokasi translok;
5. Kurangnya ketersediaan SDM fungsional dan keterbatasan anggaran.

Faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi diantaranya adalah :

1. Masih terbatasnya perluasan kesempatan kerja;
2. Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat;
3. Kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator.
4. Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;
5. Masih adanya perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja/buruh;
6. Banyaknya kesempatan bekerja ke luar negeri yang tidak bisa diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia akibat ketidak sesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kesempatan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;
7. Kuota pemberangkatan transmigrasi ke luar pulau jawa yang masih ditentukan oleh pemerintah pusat;



8. Masih banyaknya transmigran yang pulang pergi (eksodan).

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan adalah :

1. Kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya;
2. Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global;
3. Perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru;
4. Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja;
5. Tekanan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, yang terdiri dari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dan merupakan input bagi perumusan isu-isu strategis. Indikator Makro Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), indikator inilah yang harus dicapai Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dalam 5 (lima)



tahun kedepan agar bisa Mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi sehingga Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Batin.



**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Disnakertrans Kabupaten Sukabumi  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih**

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</b>					
<b>No</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>		<b>Permasalahan Pelayanan</b>	<b>Faktor</b>	
				<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Misi : 1.	Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing	Kurangnya Sumber Daya Manusia Pada bidang-bidang teknis	Rendahnya kompetensi tenaga kerja	Optimalisasi sarana prasarana dan kurikulum balai latihan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja serta wirausaha baru.
			Kurangnya sarana prasarana di bidang pelayanan ketenagakerjaan	Belum optimalnya sarana prasarana dan kurikulum balai latihan kerja.	



			Belum adanya sarana mobilitas pelayanan ketenagakerjaan	Belum terbangunnya hubungan industrial yang baik dalam menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja	
			Kurangnya tenaga penggerak swadaya masyarakat (PSM)		
	Program	1. Perencanaan Tenaga Kerja			
		2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masih kurangnya pelaksanaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat	Kurangnya minat dan kemampuan masyarakat dalam menciptakan	Banyaknya peluang wirausaha baru





				lapangan kerja sendiri	
				Rendahnya produktifitas tenaga kerja	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja
				Kurangnya frekuensi kegiatan pelatihan bagi para calon tenaga kerja	Banyaknya lowongan pekerjaan yang tidak dapat terisi
		3. Penempatan Tenaga Kerja	Masih kurangnya pengembangan perluasan kesempatan kerja	Masih banyaknya penganggur dan setengah penganggur di pedesaan	Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan
			Kurangnya fungsional pengantar kerja	Kurangnya SDM dibidang teknis ketenagakerjaan	Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait (BKPSDM) dan kementrian tenagakerja RI
			Tingkat pengangguran terbuka	Masih banyaknya tingkat	Perusahaan harus memprioritaskan masyarakat



				pengangguran terbuka	Kabupaten Sukabumi untuk mempekerjakan diperusahaannya
				Kurangnya pemahaman calon PMI terhadap aturan yang berlaku	Dipahaminya aturan penempatan PMI
				Belum semua PMI terdaftar di Disnakertrans Kab. Sukabumi	PMI terdaftar di Disnakertrans
		4. Hubungan Industrial	Kurangnya pemahaman UU 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan	Kurangnya pemahaman peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja	Dipahaminya peraturan ketenagakerjaan disetiap perusahaan dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama setiap perusahaan mendaftarkan Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama
			Terbatasnya tenaga	Kurangnya Mediator	Bertambahnya jumlah Mediator



			fungsional Mediator		
			Masih tingginya perselisihan hubungan industrial	Permasalahan antara perusahaan dengan pekerja/buruh	Meningkatnya kesejahteraan pekerja/buruh
			Masih kurangnya kepesertaan jamsostek	Kepesertaan jamsostek diperusahaan	Meningkatnya kepesertaan jamsostek
		5. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kurangnya pegawai Penggerak Swadaya Masyarakat	Tidak adanya pelatihan untuk jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Meningkatnya animo masyarakat untuk ikut bertransmigrasi
			Sarana dan prasarana kurang mendukung	Fasilitas umum yang ada di lokasi transmigrasi lokal belum memadai, masih membutuhkan rehabilitasi dan pembangunan	Adanya dukungan anggaran



				Masih kurangnya lokasi transmigrasi untuk menampung calon transmigran	Tersedianya lahan untuk pembangunan lokasi transmigrasi
				Target penempatan tidak sesuai dengan yang diharapkan	Sedikitnya kuota pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa
				Transmigran kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah penerima	Produktivitas untuk peningkatan pendapatan masyarakat transmigrasi local
				Masih ada transmigran yang kurang berhasil dan kembali ke daerah asal diakibatkan sikap mental ,kondisi lokasi	Kurangnya koordinasi pasca penempatan transmigran



		6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kurangnya pegawai Penggerak Swadaya Masyarakat	Tidak adanya pelatihan untuk jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Meningkatnya animo masyarakat untuk ikut bertransmigrasi
--	--	--------------------------------------	--	--	--



### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan R.I. dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi R.I. dan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat serta Kebijakan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi**

#### **A. Arah Kebijakan**

#### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional**

Dalam rangka mendukung agenda dan sasaran pembangunan bidang ekonomi, kebijakan dan strategi pembangunan diarahkan untuk :

- a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas;
- b. Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;
- c. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### **2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ketransmigrasian dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional**

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, tujuan yang akan dicapai terkait dengan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan;



Peningkatan dan pemanfaatan modal social budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi).

3. Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, tujuan yang akan dicapai terkait dengan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan fasilitasi bagi peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan pekerja mandiri yang berdaya saing dan inovatif;
- b. Memberikan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- c. Memberikan fasilitasi bagi pencari kerja usia muda untuk meningkatkan kemampuan menjadi pekerja mandiri;
- d. Mengembangkan kemampuan purna tenaga kerja untuk mengembangkan kemampuan sebagai pekerja mandiri;
- e. Memberikan fasilitasi penempatan tenaga kerja (baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dan pembinaan purna-kerja;
- f. Memberikan fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- g. Menyelesaikan kasus hubungan industrial secara cepat, tepat dan berkeadilan;



- h. Meningkatkan peran pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja;
  - i. Memberikan fasilitasi kepada pekerja/buruh dalam rangka mencapai kesejahteraan;
  - j. Optimasi pemeriksaan norma ketenagakerjaan terhadap perusahaan;
  - k. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawas Ketenagakerjaan;
  - l. Peningkatan pemahaman terhadap perundang ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja;
  - m. Mendorong penyelenggaraan Kerjasama antar daerah pengirim dengan daerah penempatan;
  - n. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi melalui pelatihan yang efektif.
4. Arah Kebijakan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi
- Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sukabumi, meliputi :
- a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk penyaluran tenaga kerja antar daerah;
  - b. Membuka kesempatan bekerja keluar negeri melalui kerjasama dengan BLK dan perusahaan yang memiliki akses penempatan tenaga kerja di luar negeri.





## **B. Strategi**

### **1. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian**

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, maka strategi umum bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi
- b. Meningkatkan produktivitas pekerja;
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
- f. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
- g. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- h. Menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- i. Meningkatkan tata Kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas;
- j. Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
- k. Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
- l. meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;



- m. meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis;
- n. melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel;
- o. meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- p. meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- q. meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan social tenaga kerja;
- r. meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekeija anak;
- s. meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. meningkatkan kualitas dan pengelolaam keselamatan dan kesehatan keija;
- u. menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- v. meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan
- w. teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
- x. meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;



- y. meningkatkan penerapan kebijakan tentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
  - z. meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - aa. meningkatkan perlindungan hak bagi pekeija/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
  - bb. meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - cc. peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja;
  - dd. Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program *food estate*;
  - ee. Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi).
2. Strategi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Barat
- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
  - b. Meningkatkan sarana dan prasana pelatihan kerja;
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan pekerja mandiri muda;
  - d. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi purna tenaga kerja;



- e. Menciptakan serapan tenaga kerja melalui sector primer, sekunder dan tersier;
  - f. Memperluas kesempatan kerja;
  - g. Membina sarana hubungan industrial;
  - h. Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - i. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
  - j. Mendukung terhadap terwujudnya Kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian melalui forum KIE transmigrasi;
  - k. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi.
3. Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi
- a. Persentase peningkatan kesempatan kerja;
  - b. Memperluas kesempatan kerja.



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi serta menjamin program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memperhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB prioritas sebagai berikut :

1. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem Darat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi berkontribusi terhadap TPB 1 dan TPB 10 untuk mencapai outcome yang telah ditentukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi. Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1 tanpa kemiskinan, disajikan ke dalam tabel dibawah :



**Tabel 3.4.**

Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 1  
tanpa kemiskinan

<b>Outcomes</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program</b>	<b>Para Pihak</b>
Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemic	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	



**Tabel 3.5.**

Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 10  
berkurangnya kesenjangan

<b>Outcomes</b>	<b>Arahan Kebijakan</b>	<b>Arahan Program</b>	<b>Para Pihak</b>
Berkurangnya kesenjangan dengan peningkatan ekonomi masyarakat	Pengentasan kemiskinan akibat adanya pandemic	Program perencanaan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
		Program penempatan tenaga kerja	

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 Ayat (2) dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak maka peran pemerintah daerah perlu hadir didalamnya. Tercatat hingga Tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi terdapat 2.618.381 jiwa yang merupakan Penduduk Kabupaten Sukabumi, 1.146.833 merupakan Angkatan Kerja, 715.978 Bukan Angkatan Kerja dan



1.862.811 merupakan Penduduk Usia Kerja, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 61.56% dan Tingkat Pengangguran Terbuka 9,60%. Pencari Kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekitar 17.549 dan Pencari Kerja yang telah ditempatkan sekitar 4.464, sementara penempatan pencari kerja di Tahun 2020 sangat sedikit dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu 10.023 pencari kerja yang telah ditempatkan, hal ini terjadi dikarenakan banyak perusahaan yang tutup akibat Pandemi Covid-19 yang belum selesai sampai saat ini dan terdapat tenaga kerja yang masih memiliki keterampilan yang rendah di setiap sector lapangan usaha, sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas lapangan usaha tersebut., sementara jumlah Tenaga Kerja yang di rumahkan atau di PHK sd Triwuan III Tahun 2020 di angka +/- 11.000 orang.

Secara makroekonomi, pengangguran yang ada merupakan suatu permasalahan yang perlu dijaga agar laju dan tingkat hal tersebut berada dalam batas aman. Tenaga kerja yang terampil pada zaman ini lebih ditekankan guna menghadapi perkembangan industri 4.0 dan memutus lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty). Program unggulan dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja adalah Link and Match antara pencari kerja dan penyedia lapangan Kerja dengan optimalisasi BLK dan pelatihan bekerja berbasis masyarakat

Pelayanan Bidang ketenagakerjaan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompentensi dan sarana prasarana yang memadai dengan pelayanan pelatihan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan lembaga pendidikan keterampilan yang tersedia di wilayah





Kabupaten Sukabumi telah memberikan peningkatan pendidikan bagi lembaga pendidikan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas dari lembaga itu sendiri. Dalam Mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Penempatan Tenaga Kerja.



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Sukabumi. Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah yaitu, **"Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius "**.

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Tingkat Pengangguran Terbuka

Keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, dapat digambar sebagai berikut :





Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Indikator Kinerja jangka menengah Disnakertrans sebagaimana tertuang dalam matrik sebagai berikut :



Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN 2021 - 2026					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9.25	9.00	8.75	8.50	8.25	8.00



Dari matrik tujuan, dan sasaran jangka menengah tersebut, yang menjadi indikator kinerja utama Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Utama  
Disnakertrans Kabupaten Sukabumi**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1	Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2	Meningkatnya jumlah Transmigran yang terfasilitasi	Persentase jumlah transmigran yang terlatih



## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Dokumen RPJMD. Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program, dan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Startegi dan kebijakan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel T-C.26.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</b>			
<b>MISI : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya, dan Berdaya Saing</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dalam lingkungan yang religius	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non institusional
		Memperluas kesempatan kerja	Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri
			Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja
			Memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja laki-laki
			Meningkatkan kesempatan kerja pada sektor unggulan pertanian dan pariwisata
			Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri
			Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja
			Meningkatkan Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
		Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan	Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		Peningkatan pemahaman aturan ketenagakerjaan	Meningkatkan Pembinaan masyarakat transmigrasi local
Pembinaan Sosial Ekonomi masyarakat transmigrasi local			
Pengiriman transmigran ke Luar Pulau Jawa	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi		
Fasilitasi Penanganan konflik masyarakat transmigrasi di Luar Pulau Jawa	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM		
	Fasilitasi dan klarifikasi penanganan konflik transmigrasi di Luar Pulau Jawa		





## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnakertrans Kabupaten Sukabumi. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Disnakertrans untuk urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi dari tahun 2021-2026 sebagai berikut :



**Tabel T-C.27.**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
							18.848		33.585		35.487		34.920		34.610		35.276		192.726		
		2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	100 %	13.747	100 %	17.720	100 %	19.342	100 %	18.455	100 %	18.310	100 %	18.486	100 %	106.060		
		2 07 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9 Dokumen	144	9 Dokumen	145	9 Dokumen	180	9 Dokumen	145	9 Dokumen	180	10 Dokumen	145	55 Dokumen	939		
		2 07 01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (renstra, renja, renja perubahan)	3 Dokumen	35	2 Dokumen	30	2 Dokumen	30	2 Dokumen	30	2 Dokumen	30	3 Dokumen	30	14 Dokumen	185		
		2 07 01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	6 Dokumen	60		
		2 07 01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	6 Dokumen	60		
		2 07 01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan	1 Dokumen	13	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	88		
		2 07 01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Perubahan	1 Dokumen	13	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	1 Dokumen	15	6 Dokumen	88		
		2 07 01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	28	1 Dokumen	25	1 Dokumen	60	1 Dokumen	25	1 Dokumen	60	1 Dokumen	25	6 Dokumen	223		
		2 07 01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Usuran Tenaga Kerja dan Usuran Transmigrasi	2 Dokumen	35	2 Dokumen	40	2 Dokumen	40	2 Dokumen	40	2 Dokumen	40	2 Dokumen	40	12 Dokumen	235		
		2 07 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan	5 Dokumen	10.990	67 Dokumen	10.115	67 Dokumen	11.115	67 Dokumen	12.115	67 Dokumen	12.115	67 Dokumen	12.115	340 Dokumen	68.565		
		2 07 01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bulan	10.900	14 Bulan	10.000	14 Bulan	11.000	14 Bulan	12.000	14 Bulan	12.000	14 Bulan	12.000	84 Bulan	67.900		
		2 07 01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan ASN	- Bulan	-	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	60 Bulan	50		
		2 07 01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan verifikasi keuangan SKPD	- Bulan	-	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	12 Bulan	10	60 Bulan	50		
		2 07 01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	27	12 Laporan	30	12 Laporan	30	12 Laporan	30	12 Laporan	30	12 Laporan	30	72 Laporan	177		
		2 07 01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	12	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	6 Laporan	62		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		2.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	1 Dokumen	10	6 Dokumen	60		
		2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	14 Laporan	31	14 Laporan	35	14 Laporan	35	14 Laporan	35	14 Laporan	35	14 Laporan	35	14 Laporan	35	84 Laporan	206		
		2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	1 Laporan	10	6 Laporan	60		
		2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	- Dokumen	-	1.342 Dokumen	145	2.727 Dokumen	275	2.727 Dokumen	275	2.727 Dokumen	275	2.727 Dokumen	275	2.727 Dokumen	275	12250 Dokumen	1.245		
		2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen BMD Peralatan dan Mesin	- Dokumen	-	40 Dokumen	15	40 Dokumen	15	40 Dokumen	15	40 Dokumen	15	40 Dokumen	15	40 Dokumen	15	200 Dokumen	75		
		2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Aset	- Dokumen	-	1.145 Dokumen	30	1.145 Dokumen	30	1.145 Dokumen	30	1.145 Dokumen	30	1.145 Dokumen	30	1.145 Dokumen	30	5725 Dokumen	150		
		2.07.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang akan di hapus/lelang	- Dokumen	-	145 Dokumen	75	145 Dokumen	75	145 Dokumen	75	145 Dokumen	75	145 Dokumen	75	145 Dokumen	75	725 Dokumen	375		
		2.07.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang masih dapat di pergunakan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	120 Dokumen	30	120 Dokumen	30	120 Dokumen	30	120 Dokumen	30	120 Dokumen	30	480 Dokumen	120		
		2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	- Dokumen	-	12 Dokumen	25	12 Dokumen	25	12 Dokumen	25	12 Dokumen	25	12 Dokumen	25	12 Dokumen	25	60 Dokumen	125		
		2.07.01.2.03.06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD Yang dapat dipergunakan dan aset yang dalam keadaan Rusak Berat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1.145 Dokumen	40	1.145 Dokumen	40	1.145 Dokumen	40	1.145 Dokumen	40	1.145 Dokumen	40	4580 Dokumen	160		
		2.07.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen BMD yang masih dapat di pergunakan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	120 Dokumen	60	120 Dokumen	60	120 Dokumen	60	120 Dokumen	60	120 Dokumen	60	480 Dokumen	240		
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan (orang)	90 Orang	57	90 Orang	283	90 Orang	105	90 Orang	553	90 Orang	523	90 Orang	534	540 Orang	2.055				
		2.07.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur	- Bulan	-	- Bulan	-	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	200	48 Bulan	800		
		2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	90 Stel	57	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	640 Stel	432		
				Jumlah pakaian khusus yang dibeli	- Stel	-	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	110 Stel	75	550 Stel	375		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	- Stel	-	12 Stel	8	12 Stel	8	12 Stel	8	12 Stel	8	12 Stel	8	60 Stel	40			
		2 07 01 2.05 03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian	- Dokumen	-	- Dokumen	-	75 Dokumen	17	75 Dokumen	17	75 Dokumen	17	75 Dokumen	17	300 Dokumen	68			
		2 07 01 2.05 04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpenuhiya kegiatan rapat koordinasi	- Bulan	-	- Bulan	-	12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	48 Bulan	100			
		2 07 01 2.05 05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan	- Laporan	-	- Laporan	-	24 Laporan	15	24 Laporan	15	24 Laporan	15	24 Laporan	15	96 Laporan	60			
		2 07 01 2.05 06		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	- Orang	-	7 Orang	35	7 Orang	35	7 Orang	35	1 Orang	5	2 Orang	10	24 Orang	120			
		2 07 01 2.05 07		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang meninggal dunia	- Orang	-	- Orang	-	2 Orang	10	2 Orang	10	2 Orang	10	2 Orang	10	8 Orang	40			
		2 07 01 2.05 08		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang naik jabatan	- Orang	-	- Orang	-	4 Orang	2	6 Orang	3	6 Orang	3	3 Orang	9	19 Orang	17			
		2 07 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta training soft skill	- Orang	-	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	150 Orang	150			
		2 07 01 2.05 10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Orang	-	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	150 Orang	150			
		2 07 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi perundang-undangan	- Orang	-	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	30 Orang	30	150 Orang	150			
		<b>2 07 01 2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>543</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.017</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.457</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.457</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.457</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.457</b>	<b>72 Bulan</b>	<b>7.388</b>			
		2 07 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen yang dibeli	- Unit	-	3 Unit	180	3 Unit	180	3 Unit	180	3 Unit	180	3 Unit	180	15 Unit	900			
		2 07 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang terpelihara	- Unit	-	- Unit	-	25 Unit	125	25 Unit	125	25 Unit	125	25 Unit	125	100 Unit	500			
		2 07 01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	57	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30	12 Bulan	30	72 Bulan	207			
		2 07 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	100 Jenis	180	145 Jenis	185	145 Jenis	185	145 Jenis	185	145 Jenis	185	145 Jenis	185	825 Jenis	1.105			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah Makan dan minum yang dibeli	12 Bulan	-	12 Bulan	84	12 Bulan	84	12 Bulan	84	12 Bulan	84	12 Bulan	84	72 Bulan	420			
		2 07 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fasilitas barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	54	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	12 Bulan	150	72 Bulan	804			
		2 07 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/informasi	12 Bulan	-	12 Bulan	55	12 Bulan	55	12 Bulan	55	12 Bulan	55	12 Bulan	55	72 Bulan	275			
		2 07 01 2.06 07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Material yang di beli	- Unit	-	- Unit	-	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	80 Unit	800			
		2 07 01 2.06 08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Mamin Tamu yang dibeli	- Bulan	-	12 Bulan	33	12 Bulan	33	12 Bulan	33	12 Bulan	33	12 Bulan	33	60 Bulan	165			
		2 07 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhnya kegiatan rapat koordinasi	12 Bulan	252	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan	300	72 Bulan	1.752			
		2 07 01 2.06 10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip/Dokumen yang di tata	- Dokumen	-	- Dokumen	-	12 Dokumen	15	12 Dokumen	15	12 Dokumen	15	12 Dokumen	15	48 Dokumen	60			
		2 07 01 2.06 11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang mendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	- Unit	-	- Unit	-	2 Unit	100	2 Unit	100	2 Unit	100	2 Unit	100	8 Unit	400			
		2 07 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	45 Unit	299	50 Unit	3.700	50 Unit	3.700	48 Unit	1.200	45 Unit	850	45 Unit	850	283 Unit	10.559			
		2 07 01 2.07 01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibeli	- Unit	-	1 Unit	300	1 Unit	300	1 Unit	300	1 Unit	300	1 Unit	300	5 Unit	1.500			
		2 07 01 2.07 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang dibeli (R2 dan R4)	- Unit	-	3 Unit	350	3 Unit	350	3 Unit	350	- Unit	-	- Unit	-	9 Unit	1.050			
		2 07 01 2.07 05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelar yang dibeli	23 Unit	61	15 Unit	90	15 Unit	90	15 Unit	90	15 Unit	90	15 Unit	90	98 Unit	511			
		2 07 01 2.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	- Unit	-	12 Unit	190	12 Unit	190	12 Unit	190	12 Unit	190	12 Unit	190	60 Unit	950			
		2 07 01 2.07 08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Task Berwujud yang dibeli	- Unit	-	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	1 Unit	100	5 Unit	500			
		2 07 01 2.07 09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dibangun (Kantor Dinas dan BLK)	- Unit	-	2 Unit	2.500	2 Unit	2.500	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	4 Unit	5.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	22 Unit	198	8 Unit	75	8 Unit	75	8 Unit	75	8 Unit	75	8 Unit	75	8 Unit	75	62 Unit	573		
		2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	- Unit	-	8 Unit	95	8 Unit	95	8 Unit	95	8 Unit	95	8 Unit	95	8 Unit	95	40 Unit	475		
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	1.062	12 Bulan	1.180	12 Bulan	1.430	12 Bulan	1.630	12 Bulan	1.830	12 Bulan	2.030	72 Bulan	9.162				
		2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	- Bulan	-	- Bulan	-	12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	12 Bulan	25	48 Bulan	100				
		2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	162	12 Bulan	180	12 Bulan	180	12 Bulan	180	12 Bulan	180	12 Bulan	180	72 Bulan	1.062				
		2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesi yang terpelihara	- Unit	-	- Unit	-	60 Unit	25	60 Unit	25	60 Unit	25	60 Unit	25	240 Unit	100				
		2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Supir dan Non PNS (Bulan)	13 Bulan	900	13 Bulan	1.000	13 Bulan	1.200	13 Bulan	1.400	13 Bulan	1.600	13 Bulan	1.800	78 Bulan	7.900				
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	36 Unit	692	100 Unit	1.135	128 Unit	1.080	128 Unit	1.080	128 Unit	1.080	128 Unit	1.080	648 Unit	6.147				
		2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	6 Unit	292	6 Unit	350	6 Unit	350	6 Unit	350	6 Unit	350	6 Unit	350	36 Unit	2.042				
		2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan yang dipelihara	30 Unit	298	30 Unit	300	30 Unit	300	30 Unit	300	30 Unit	300	30 Unit	300	180 Unit	1.798				
		2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	- Unit	-	- Unit	-	26 Unit	45	26 Unit	45	26 Unit	45	26 Unit	45	104 Unit	180				
		2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	- Unit	-	60 Unit	35	60 Unit	35	60 Unit	35	60 Unit	35	60 Unit	35	300 Unit	175				
		2.07.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	- Unit	-	2 Unit	150	2 Unit	150	2 Unit	150	2 Unit	150	2 Unit	150	10 Unit	750				
		2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	- Unit	102	2 Unit	300	4 Unit	200	4 Unit	200	4 Unit	200	4 Unit	200	18 Unit	1.202				
Terwujudnya masyarakat yang	Menurunkan tingkat gangguan	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 %	500	92 %	160	94 %	160	96 %	160	98 %	160	100 %	160	100 %	1.300				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	2 Dokumen	500	2 Dokumen	160	2 Dokumen	160	2 Dokumen	160	2 Dokumen	160	12 Dokumen	800				
		2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	- Dokumen	-	1 Dokumen	60	1 Dokumen	60	1 Dokumen	60	1 Dokumen	60	5 Dokumen	300			
		2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	200	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	6 Dokumen	700			
							Pembangunan Aplikasi SILENT CENTER	1 Unit	300	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	1 Unit	300	Janji Politik 100 Hari Kerja			
		2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,1 %	850	2,3 %	7.180	2,5 %	7.630	2,7 %	7.750	2,9 %	7.785	3 %	7.925	3 %	39.120		
		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi	560 Orang	550	460 Orang	4660	512 Orang	5150	512 Orang	5150	512 Orang	5150	3068 Orang	25.810			
		2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Peserta Bidang Keahlian CCPOA Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750	Pemulihan Ekonomi Daerah
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian CCPOA Non Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Furniture Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Furniture Non Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Instalasi Penerangan Instiusional	16 Orang	550	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	96 Orang	1.300		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Instalasi Penerangan Non Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Las Industri SMAW Instiusional	16 Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	96 Orang	750		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Las Industri SMAW Non Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Membatik Non Instiusional	- Orang	-	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	160 Orang	1.500		
							Jumlah Peserta Bidang Keahlian Menjahit Instiusional	16 Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	96 Orang	750		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian Menjahit Non Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian Perakitan Komputer Instiusional	16 Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	96 Orang	750		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian Perakitan Komputer Non Instiusional	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	80 Orang	750		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Manufaktur Instiusional	16 Orang	-	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	176 Orang	1.500		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian Teknik Refrigerasi Domestik Instiusional	- Orang	-	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	160 Orang	1.500		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian Sepeda Motor Instiusional	- Orang	-	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	64 Orang	600		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian Sepeda Motor Non Instiusional	- Orang	-	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	64 Orang	600		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian PHP Instiusional	- Orang	-	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	64 Orang	600		
					Jumlah Peserta Bidang Keahlian PHP Non Instiusional	- Orang	-	- Orang	-	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	16 Orang	150	64 Orang	600		
					Jumlah CPMI Bidang Keahlian Pengurus Bayi	- Orang	-	48 Orang	450	48 Orang	450	48 Orang	450	48 Orang	450	48 Orang	450	240 Orang	2.250		
					Jumlah CPMI Bidang Keahlian Pengurus Lansia	- Orang	-	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	160 Orang	1.500		
					Jumlah CPMI Bidang Keahlian Asisten Rumah Tangga	- Orang	-	48 Orang	450	48 Orang	450	48 Orang	450	48 Orang	450	48 Orang	450	240 Orang	2.250		
					Jumlah CPMI Bidang Keahlian Kecantikan	- Orang	-	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	32 Orang	300	160 Orang	1.500		
		2 07 03 2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana	Jumlah lembaga dan sektor swasta yang melakukan kerjasama untuk penyediaan instruktur	- Lembaga	-	5 Lembaga	100	5 Lembaga	100	5 Lembaga	100	5 Lembaga	100	5 Lembaga	100	25 Lembaga	500		
					Jumlah peserta yang melaksanakan sinergitas pelatihan kerja	- Orang	-	12 Orang	110	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	12 Orang	110		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		2.07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Pelatihan (BLK dan LPK)	- Unit	-	30 Unit	250	30 Unit	250	30 Unit	250	30 Unit	250	30 Unit	250	150 Unit	1.250		
		2.07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang dibina	55 LPK	50	25 Lembaga	400	25 Lembaga	400	30 Lembaga	450	30 Lembaga	450	35 Lembaga	500	200 Lembaga	2.250		
		2.07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Peserta Bimtek Tata Kelola dan Operasional LPK Swasta/BLK Komunitas	25 Orang	50	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	25 Orang	50		
							Jumlah LPK Swasta / BLK Komunitas yang dibina	- Lembaga	-	25 Lembaga	400	25 Lembaga	400	30 Lembaga	450	30 Lembaga	450	35 Lembaga	500	145 Lembaga	2.200		
		2.07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga yang Berizin dan Terdaftar	- Lembaga	-	25 Lembaga	80	30 Lembaga	90	50 Lembaga	160	50 Lembaga	160	75 Lembaga	255	230 Lembaga	745		
		2.07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perizinan LPK Swasta/BLK Komunitas	- Lembaga	-	15 Lembaga	60	15 Lembaga	60	30 Lembaga	120	30 Lembaga	120	45 Lembaga	200	135 Lembaga	560		
							Jumlah lembaga yang diverifikasi	- Lembaga	-	10 Lembaga	20	15 Lembaga	30	20 Lembaga	40	20 Lembaga	45	30 Lembaga	55	95 Lembaga	190		
		2.07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Produktivitas Perusahaan Kecil	- Orang	-	135 Orang	470	135 Orang	420	135 Orang	370	160 Orang	390	160 Orang	340	725 Orang	1.990		
		2.07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah peserta forum peningkatan produktivitas	- Orang	-	40 Orang	300	40 Orang	250	40 Orang	200	40 Orang	150	40 Orang	100	200 Orang	1.000		
							Jumlah Produktivitas Perusahaan Kecil	- Orang	-	75 Orang	150	75 Orang	150	75 Orang	150	100 Orang	220	100 Orang	220	425 Orang	890		
							Jumlah Peserta Pemagangan dalam negeri yang difasilitasi	- Orang	-	20 Orang	20	20 Orang	20	20 Orang	20	20 Orang	20	20 Orang	20	100 Orang	100		
		2.07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta calon wirausaha baru yang dilatih	332 Orang	250	202 Orang	1.570	202 Orang	1.570	212 Orang	1.620	212 Orang	1.635	222 Orang	1.680	1382 Orang	8.325		
		2.07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Alumni Pelatihan	25 Orang	150	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	25 Orang	150		
							Jumlah Perusahaan yang dibina untuk Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Penghargaan Sidhakarya/Paramakarya	2 Perusahaan	-	2 Perusahaan	60	2 Perusahaan	60	2 Perusahaan	60	2 Perusahaan	75	2 Perusahaan	70	12 Perusahaan	325		
							Jumlah Peserta Rakor Kepala Desa dalam rangka kerjasama pelatihan	25 Orang	100	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	25 Orang	100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah Peserta Pemagangan pada UMKM / Pelaku Ekonomi Kreatif	- Orang	-	10 Orang	220	10 Orang	220	10 Orang	220	10 Orang	220	10 Orang	220	50 Orang	1.100		Janji Politik Sinergi dengan Dekranasda	
					Jumlah Rapat Koordinasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Orang	-	50 Orang	100	50 Orang	100	50 Orang	100	50 Orang	100	50 Orang	100	250 Orang	500			
					Jumlah Peserta pelatihan menjahit sepatu	- Orang	-	40 Orang	440	40 Orang	440	40 Orang	440	40 Orang	440	40 Orang	440	200 Orang	2.200			
					Jumlah Peserta Pelatihan Life Skill pada kawasan unggulan																Janji Politik Sinergi dengan CPUUG	
					- Pelatihan Bahasa pemandu geo wisata dikawasan CPUUG	- Orang	-	40 Orang	400	40 Orang	400	40 Orang	400	40 Orang	400	40 Orang	400	200 Orang	2.000			
					- Pelatihan Geo Kuliner dikawasan CPUUG	- Orang	-	40 Orang	250	40 Orang	250	40 Orang	250	40 Orang	250	40 Orang	250	200 Orang	1.250			
					- Pelatihan Geo Produk dan Ekonomi Kreatif	- Orang	-	20 Orang	100	20 Orang	100	30 Orang	150	30 Orang	150	40 Orang	200	140 Orang	700			
		2 07 04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	27 %	2.780	28 %	6.210	29 %	5.915	30 %	6.140	31 %	6.140	32 %	6.140	32 %	33.325			
		2 07 04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1024 Orang	1.715	1.823 Orang	4.915	1.735 Orang	4.590	1.823 Orang	4.815	1.823 Orang	4.815	1.823 Orang	4.815	10051 Orang	25.665			
		2 07 04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	20 BKK	15	15 BKK	15	15 BKK	15	15 BKK	15	15 BKK	15	15 BKK	15	95 BKK	90			
		2 07 04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	- Orang	-	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	500 Orang	500			
		2 07 04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Orang	-	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	250 Orang	250			
		2 07 04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Orang	-	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	250 Orang	250			
		2 07 04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	352 Orang	900	352 Orang	1.000	440 Orang	1.125	440 Orang	1.125	440 Orang	1.125	440 Orang	1.125	2464 Orang	6.400		Pemulihan Ekonomi Daerah	
					Jumlah Tenaga Kerja Rabat Beton	264 Orang	800	880 Orang	2.250	880 Orang	2.250	528 Orang	1.350	528 Orang	1.350	528 Orang	1.350	3608 Orang	9.350			
					Jumlah Tenaga Kerja Tembok Penahan Tanah	- Orang	-	88 Orang	225	- Orang	-	352 Orang	900	352 Orang	900	352 Orang	900	1144 Orang	2.925			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
					Jumlah Tenaga Kerja PIPANISASI	- Orang		88 Orang	225	- Orang		88 Orang	225	88 Orang	225	88 Orang	225	352 Orang	900			
					Jumlah Peserta Budidaya Perikanan Darat	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Bengkel Las	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Menjahit	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Pengolahan Hasil Pertanian	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Sablon	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Budidaya Ikan Koi	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Bengkel Bubut	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Teknologi Tepat Guna Pembuatan Pakan Ternak	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
					Jumlah Peserta Teknologi Tepat Guna	- Orang		20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	100 Orang	500			
		2 07 04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- LPTKS		5 LPTKS	50	10 LPTKS	100	10 LPTKS	100	10 LPTKS	100	10 LPTKS	100	45 LPTKS	450			
		2 07 04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	- LPTKS		LPTKS		5 LPTKS	50	5 LPTKS	50	5 LPTKS	50	5 LPTKS	50	20 LPTKS	200			
		2 07 04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	- LPTKS		5 LPTKS	50	5 LPTKS	50	5 LPTKS	50	5 LPTKS	50	5 LPTKS	50	25 LPTKS	250			
		2 07 04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	- Unit		1 Unit	600	1 Unit	600	1 Unit	600	1 Unit	600	1 Unit	600	5 Unit	3.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2.07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Aplikasi SILENT CENTER yang dipelihara dan dikembangkan	- Unit	-	1 Unit	300	1 Unit	300	1 Unit	300	1 Unit	300	1 Unit	300	5 Unit	1.500	Janji Politik : SILENT CENTER	
		2.07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Peserta sosialisasi PK Online	- Unit	-	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	500 Orang	500	Janji Politik : SILENT CENTER	
		2.07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Event Job Fair	- Kali	-	1 Kali	200	1 Kali	200	1 Kali	200	1 Kali	200	1 Kali	200	5 Kali	1.000		
		2.07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Pengangsur Sementara yang dilatih	268 Orang	1.015	450 Orang	585	440 Orang	565	440 Orang	565	440 Orang	565	440 Orang	565	2478 Orang	3.860		
		2.07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI bermasalah	8 Orang	15	15 Orang	85	15 Orang	85	15 Orang	85	15 Orang	85	15 Orang	85	83 Orang	440		
		2.07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peserta Diseminasi	100 Orang	250	375 Orang	380	375 Orang	380	375 Orang	380	375 Orang	380	375 Orang	380	1975 Orang	2.150		
							Peserta Rakor P3MI	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	-	180 Orang	-		
							Sinergitas optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap	- Orang	-	20 Orang	50	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	20 Orang	50		
		2.07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (yang dilatih Life Skill)													-	-	Janji Politik : Life Skill	
							Jumlah Peserta Budidaya Perikanan Darat	20 Orang	125	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	20 Orang	125		
							Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Bengkel Las	20 Orang	125	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	20 Orang	125		
							Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Menjahit	40 Orang	250	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	40 Orang	250		
							Jumlah Peserta Pembekalan Wirausaha Pengolahan Hasil Pertanian	20 Orang	125	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	20 Orang	125		
							Jumlah Peserta Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Solar	20 Orang	125	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	20 Orang	125		
							Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna (yang mengikuti Pembekalan Kewirausahaan)	- Orang	-	10 Orang	70	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	20 Orang	100	90 Orang	470		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2.07	04	2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina	40 Perusahaan	50	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	415 Perusahaan	350			
		2.07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing	50 Perusahaan	50	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	425 Perusahaan	350		
		2.07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	575	100 %	1.830	100 %	1.930	100 %	1.930	100 %	1.730	100 %	2.080	100 %	10.075			
		2.07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Jumlah perusahaan yang dibina	10 Lembaga	25	100 Lembaga	280	100 Lembaga	180	100 Lembaga	180	100 Lembaga	180	100 Lembaga	230	510 Lembaga	1.075			
		2.07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	25 Perusahaan	25	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	75 Perusahaan	60	400 Perusahaan	325		
		2.07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama	- Perusahaan	-	25 Perusahaan	120	25 Perusahaan	120	25 Perusahaan	120	25 Perusahaan	120	25 Perusahaan	120	125 Perusahaan	600		
		2.07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Profil Ketenagakerjaan	- Dokumen	-	1 Dokumen	100	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	50	2 Dokumen	150		
		2.07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial	65 Kasus	550	65 Kasus	1.550	65 Kasus	1.750	65 Kasus	1.750	65 Kasus	1.550	65 Kasus	1.850	390 Kasus	9.000			
		2.07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Jumlah Pencegahan Permasalahan Hubungan Industrial (Kasus)	24 Kasus	350	36 Kasus	50	36 Kasus	50	36 Kasus	50	36 Kasus	50	36 Kasus	50	204 Kasus	600		
						Peserta Pemilihan Pekerja Teladan (Orang)	50 Orang	-	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	50 Orang	50	300 Orang	250			
						Peserta Pemilihan Perusahaan Terbaik PembinaPekerja Perempuan (Perusahaan)	50 Perusahaan	-	50 Perusahaan	50	50 Perusahaan	50	50 Perusahaan	50	50 Perusahaan	50	50 Perusahaan	50	300 Perusahaan	250			
						Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Rapat Koordinasi dan Honor, Kajian Kebutuhan Hidup Layak dan Kemampuan Perusahaan, Kaji Terap Dewan Pengupahan)	41 Orang	-	41 Orang	300	41 Orang	500	41 Orang	300	41 Orang	300	41 Orang	300	246 Orang	1.700			
						Fasilitasi Hari Buruh Nasional (persiapan hari buruh nasional, evaluasi hari buruh nasional dan Forum Group Discussion (FGD))	200 Orang	-	500 Orang	150	500 Orang	150	500 Orang	150	500 Orang	150	500 Orang	150	2700 Orang	750			
		2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial	65 Kasus	50	35 Kasus	50	35 Kasus	50	35 Kasus	50	35 Kasus	50	35 Kasus	50	240 Kasus	300		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Jumlah Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang terbina	50 Serikat Pekerja	50	50 Serikat Pekerja	500	50 Serikat Pekerja	500	50 Serikat Pekerja	500	50 Serikat Pekerja	500	50 Serikat Pekerja	500	50 Serikat Pekerja	800	300 Serikat Pekerja	2.850		
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi LKS Tripartit (Rapat, Honorarium dan Kaji Terap)	28 Orang	100	28 Orang	200	28 Orang	200	28 Orang	400	28 Orang	200	28 Orang	200	28 Orang	200	168 Orang	1.300		
		2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Kepesertaan Jamsostek di perusahaan	- Orang	-	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	100 Orang	100	500 Orang	500		
				Jumlah Perusahaan dan Karyawan yang Memahami Pentingnya Fasilitas Kesejahteraan Pegawai	- Perusahaan	-	100 Perusahaan	100	100 Perusahaan	100	100 Perusahaan	100	100 Perusahaan	100	100 Perusahaan	100	100 Perusahaan	100	500 Perusahaan	500		
		3.32.03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi</b>	20 %	383	20 %	135	20 %	160	20 %	135	20 %	135	20 %	135	20 %	135	100 %	1.083		
		3.32.03.2.01	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lokasi Transmigran yang ditinjau</b>	5 KK	383	5 KK	135	5 KK	160	5 KK	135	5 KK	135	5 KK	135	5 KK	135	30 KK	1.083		
		3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Kerjasama antar wilayah transmigrasi	1 MOU	20	1 MOU	30	2 MOU	30	1 MOU	30	1 MOU	30	1 MOU	30	1 MOU	30	7 MOU	170		
		3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Seempat dan Transmigran	Jumlah Lokasi yang di Tinjau dan Bina	1 Lokasi	25	1 Lokasi	25	2 Lokasi	50	1 Lokasi	25	1 Lokasi	25	1 Lokasi	25	1 Lokasi	25	7 Lokasi	175		
		3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang di tempatkan ke luar pulau Jawa	5 KK	28	5 KK	40	5 KK	40	5 KK	40	5 KK	40	5 KK	40	5 KK	40	30 KK	228		
		3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah masyarakat transmigrasi lokal yang terbina	5 Lokasi	310	- Lokasi	-	- Lokasi	-	- Lokasi	-	- Lokasi	-	- Lokasi	-	- Lokasi	-	5 Lokasi	310		
				Jumlah Sosialisasi Informasi Program Transmigrasi (Kecamatan)	- Kecamatan	-	47 Kecamatan	30	47 Kecamatan	30	47 Kecamatan	30	47 Kecamatan	30	47 Kecamatan	30	47 Kecamatan	30	235 Kecamatan	150		
		3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang terlatih	- KK	-	5 KK	10	5 KK	10	5 KK	10	5 KK	10	5 KK	10	5 KK	10	25 KK	50		
		3.32.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih</b>	16,6 %	13	16,6 %	350	20,0 %	350	20,4 %	350	21,2 %	350	21,8 %	350	21,8 %	350	100 %	1.763		
		3.32.04.2.01	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>Jumlah peserta masyarakat yang diberi sosialisasi transmigrasi</b>	200 Orang	13	250 Orang	350	250 Orang	350	250 Orang	350	250 Orang	350	250 Orang	350	250 Orang	350	1450 Orang	1.763		
		3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Transmigrasi	30 Orang	13	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	30 Orang	13		
				Jumlah KK Masyarakat Translok yang dibina	- KK	-	205 KK	300	205 KK	300	205 KK	300	205 KK	300	205 KK	300	205 KK	300	1025 KK	1.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
					Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)										
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)							
		3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Lokasi Penempatan Trans Asal Kab. Sukabumi yang terbina di Luar Pulau Jawa	-	Lokasi	-	1	Lokasi	50	1	Lokasi	50	1	Lokasi	50	1	Lokasi	50	5	Lokasi	250		





## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan ke dalam tabel berikut ini :



Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020 (Realisasi)	2021 (Proyeksi)	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		90	92	94	96	98	100	100
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		27	28	29	30	31	32	32
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0	3,0
5	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi		20	20	20	20	20	20	100
6	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih		16,6	16,6	20	20,4	21,2	21,8	100



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Disnakertrans Kabupaten Sukabumi adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Disnakertrans dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kabupaten Sukabumi.

Maka penyusunan Renstra OPD merupakan masukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Bappeda Kabupaten Sukabumi dalam penyusunan RKPd, KUA- PPAS. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, fluktuasi harga pasar dan adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.



**Rencana Strategis (RENSTRA)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026**

---

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 yang akan menjadi acuan atau pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatannya tahun 2021 – 2026.

Sukabumi, 2021

Kepala  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sukabumi



**USMAN JAELANI, SH., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641207 199503 1 001